

BAB II KAJIAN TEORETIK

2.1 Deskripsi Konseptual

2.1.1 Teori Ancaman

Banyu Perwita (2006) dalam *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* menyatakan bahwa secara tradisional ancaman muncul dari eksternal (luar negara). Namun perkembangan kekinian menarik *The Origin of Threats* menjadi lebih luas, di mana ancaman tidak hanya datang dari eksternal (luar negara), namun juga dari dalam negara atau domestik. Sementara itu dalam tataran sifat atau *nature*, secara tradisional ancaman selalu bersifat militeristik, sehingga pendekatan yang digunakan juga selalu melibatkan unsur militer. Sementara konsep ancaman non-tradisional yang mengikuti perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional mengembangkan ancaman menjadi lebih luas, kompleks dan komprehensif karena mencakup berbagai aspek lainnya seperti ideologi, ekonomi, politik, sosial dan budaya, pertahanan dan juga keamanan (ipolesosbudhankam).¹³

Berdasarkan Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015), kompleksitas ancaman bagi Indonesia digolongkan ke dalam pola dan jenis ancaman yang multi dimensional berupa ancaman militer, ancaman non militer dan ancaman hibrida, yang kemudian dapat dikategorikan lagi menjadi ancaman dalam bentuk nyata dan belum nyata. Pertahanan Negara Indonesia kemudian dikembangkan untuk membangun keterpaduan antara pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan yang kuat dan disegani serta memiliki daya tangkal yang tinggi.¹⁴

¹³ Banyu Perwita, dan Y.M Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2006) hlm 123-125

¹⁴ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

Ancaman dapat datang dari darat, udara maupun laut, sehingga pertahanan Indonesia dikembangkan dalam sebuah pengembangan kapasitas pertahanan yang saling berkait, komprehensif dan holistik melalui penetapan *Minimum Essential Force* (MEF) yang mencakup upaya peremajaan dan penambahan alutsista yang dimiliki masing-masing matra TNI, baik darat, laut maupun udara.

Chanakya, dalam Arthashastra menawarkan teori bahwa “*an immediate neighbouring state is an enemy and a neighbour’s neighbour, separated from oneself by the intervening enemy, is a friend*”.¹⁵ Mengapa Chanakya menganggap wilayah Negara yang berdekatan secara langsung adalah musuh, sementara yang berjauhan adalah kawan. Untuk menjelaskannya Chanakya membuat cara pandang yang disebut teori Mandala, di mana negara tetangga yang berdekatan dianggap sebagai musuh/ kompetitor alami (potensi ancaman yang berasal dari negara tetangga yang berdekatan itu lebih besar, dianggap lebih mudah melakukan penyerangan karena jarak wilayah yang berbatasan itu dekat. Tetapi negara manapun yang wilayahnya dihalangi oleh negara musuh/ kompetitor dianggap sebagai sekutu, atau, musuh dari musuh saya adalah teman bagi saya.

Chanakya menggambarkan Mandala atau Lingkaran Negara-negara (*Circle of States*) seperti sebuah roda dengan penakluk sebagai sentralnya. Sekutu-sekutunya ditarik menuju posisinya di sepanjang jari-jari roda meskipun mereka dipisahkan oleh wilayah musuh.¹⁶ Ketika dianggap tepat, *Vijigīṣu* (raja penakluk) menerapkan enam metode kebijakan luar negeri, yang umumnya dikenal sebagai enam kebijakan politik, *Ṣāḍgunya*, (*the six-fold policy*), terhadap berbagai komponen dalam Mandala Negara-negaranya. Metode tersebut bekerja saling terkait dan mengikat satu sama lain kepada penakluknya sehingga sang *Vijigīṣu* (raja penakluk) dapat melakukan apapun yang diinginkan selama itu perlu

¹⁵ L.N. Rangarajan, *op.cit.* hlm. 542.

¹⁶ *ibid.* hlm. 561

menurutnya. Enam kebijakan politik luar negeri Chanakya (*Ṣāḍgunya*) merupakan penentu kebijakan yang akan diambil apakah akan mundur, stabil/berdiam diri atau maju.

2.1.2 Teori *Statecraft*

Studi tentang elit dan pemimpin politik merupakan salah satu pilar penting dalam ilmu politik. *Statecraft* merupakan sebuah kerangka kerja untuk mempelajari hal tersebut. Teori *statecraft* pertama kali dikembangkan oleh Jim Bupitt, seorang akademisi dari Inggris pada tahun 1986. Pendekatan kenegaraan/*statecraft* berkaitan dengan bagaimana elit politik menghadapi, menanggapi dan mengatur tantangan yang muncul.¹⁷ Dr. John Lenczowski, *Founder and President of The Institute of World Politics* (IWP) menyatakan bahwa *statecraft* merupakan seni dalam menggunakan instrumen kekuatan nasional untuk mencapai tujuan membela kepentingan nasional yang vital (*vital national interest*), melancarkan hubungan internasional, dan akhirnya menjadi penyebab perdamaian di dunia. Berbagai instrument yang termasuk ke dalamnya antara lain: strategi militer, seni diplomasi, berbagai jenis diplomasi publik yang melibatkan hubungan dengan orang-orang dan juga dengan pengaruh asing sebagai lawan dari diplomasi tradisional yang melibatkan hubungan dengan para penguasa. Seni *statecraft* lainnya termasuk intelegen dan kontra intelegen.¹⁸

Bagi Machiavelli *statecraft* merupakan sebuah keahlian yang harus dimiliki oleh seorang negarawan. *Statecraft* ini terkait pula dengan cara ia menggunakan kekuasaan yang dimiliki, untuk mencapai tujuan yang lebih besar (tujuan negara). Machiavelli menyatakan bahwa negara yang jaya dan besar merupakan negara yang disegani oleh banyak negara-negara lainnya. Disegani merujuk pada artian dihormati dan ditakuti namun sekaligus dapat dimintai bantuan perlindungan. Untuk mencapai hal

¹⁷ Toby S James, "Neo-Statecraft Theory, Historical Institutionalism and Institutional Change", *University of East Anglia*, 2016 Dalam https://ueaeprints.uea.ac.uk/54729/1/James_GOV_for_web.pdf diakses pada 17 Juni 2018

¹⁸ John Lenczowski, What is Statecraft. The Institution of World Politics, 2017, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=GdN4Sh1RjkU> diakses pada 17 Juni 2018

tersebut negara harus memiliki tentara yang kuat yang dibentuk dari rakyatnya sendiri melalui pelatihan wajib militer. Negara yang kuat dan jaya juga wajib memiliki penguasa yang cakap dan cerdas sehingga bisa mempertahankan kekuasaannya dari konspirasi maupun usaha-usaha kudeta baik yang berasal dari dalam negeri sendiri maupun dilakukan dengan bantuan asing. Hal terpenting lainnya adalah sang penguasa ini harus memiliki rakyat yang taat pada penguasa dan siap membela negara dan penguasa dari berbagai jenis ancaman yang membahayakan eksistensi yang penguasa dan negara mereka.¹⁹

Sementara itu, seni kenegaraan atau statecraft Indonesia pada jaman kerajaan dulu banyak dibahas dalam karya “Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX” karya Soemarsaid Moertono (2018). Hubungan antara rakyat dan raja/ penguasa disini disebut sebagai *kawulo lan gusti*. Seorang raja tanpa ada rakyat maka kekuasaan yang dimiliki jadi tak berguna. Raja hendaknya memiliki sifat bijaksana agar disegani oleh rakyat. Sifat bijaksana mencakup perilaku adil dalam penyelesaian masalah, serta bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpin. Sifat lain yang harus dimiliki pemimpin itu juga tertanam dalam konsep *astabrata*. Bangsawan/ Priyayi juga memiliki peranan yang penting dalam tata negara di kerajaan jaman mataram yang dijadikan bahan pembahasan oleh Moertono. Kaum priyayi merupakan kaki tangan raja. Mereka bertugas mengurus semua kondisi dalam suatu wilayah kerajaan. Wilayah kerajaan pada masa konsep pemerintahan ini terbagi menjadi dua, *Negaragung* dan *mancanegara*. Daerah *mancanegara* ini dipimpin oleh seorang bupati, yang merupakan abdi dari Raja, dan harus tunduk pada perintah raja.²⁰

Terkait dengan upaya mendapat atau memperluas wilayah raja memiliki tiga jenis cara. Pertama adalah dengan melakukan kekerasan atau peperangan. Kedua adalah dengan cara memaksa orang yang

¹⁹ Herbert Butterfield, *The Statecraft of Machiavelli*. (New York: Collier Books, 1967).

²⁰ Soemarsaid Moertono, *Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018).

berpengaruh pada wilayah tertentu (yang akan dikuasai) untuk tinggal dalam istana dalam jangka waktu tertentu sementara wilayahnya dibiarkan diurus oleh pejabat keraton. Sedangkan cara terakhir adalah dengan menjalin persekutuan melalui perkawinan.²¹

Di sisi lain, menurut Chanakya dalam Arthashastra, tata pemerintahan tercakup ke dalam teori yang disebut sebagai *Teori Saptanga*. *Sapta* dalam Bahasa Sansekerta berarti tujuh dan *anga* berarti bagian-bagian tubuh. Maka *saptanga* merujuk pada pengertian tujuh bagian tubuh. Negara dalam artashastra dianalogikan sebagai organisme yang berkembang dan *prakritis* adalah bagian tubuhnya.²² Tujuh bagian ini antara lain: *Swamin* (*Ruler, Raja/ Pennguasai/ Pemimpin negara*); *Amatya* (*concilors/ anggota dewan/ mereka yang mewakili institusi negara*); *Janapada* (*Territory/ resources/ sumber daya negara, termasuk wilayah dan penduduk*); *Durg* (*Well-fortified Sovereign entity/ entitas berdaulat yang dibentengi*); *Kosa* (*Treasury/ Perbendaharaan*); *Danda/ Bala* (*Military/ Army and order keeping/ Militer dan penjagaan ketertiban*); dan *Mitra* (*Friend/ Ally/ teman dan sekutu negara*).²³

Sebagai bagian tubuh, ketujuh elemen ini tidak dapat terpisahkan dan dibutuhkan untuk pertumbuhan negara secara menyeluruh. Setiap bagian tersebut memainkan peranan yang penting. Secara umum urutan kepentingannya bersifat menurun dalam artian *Swamin* lebih penting dari *amatya*, lalu *janapada*, *durga*, *kosa*, *bala*, lalu terakhir *mitra*. Namun dalam kenyataannya urutan ini tidak terlalu penting, terlebih jika negara dihadapkan terhadap ancaman tertentu, urutan ini bisa berubah secara dinamis. Karena bagi Chanakya kehati-hatian lebih penting dari aturan. Dia tidak menganggap remeh apapun. Sehingga ia menulis “[*Lastly*] a calamity which threatens to destroy all other elements shall be considered as [the

²¹ *Ibid.*

²² Sukra, *Sukraniti*, Mumbai: Khemraj Shrikrisnadass, 2012, chapter 1, sutra 62

²³ Kautilya Arthashastra 6:1

most] serious, irrespective of what position the element occupies in the list of priorities".²⁴

Statecraft menurut Chanakya dalam Arthashastra ditujukan untuk mencapai apa yang disebut sebagai *yogakshema* yang berarti menikmati kedamaian yang didapat dari kesejahteraan/ kemakmuran, yaitu menikmati kesejahteraan serta keamanan secara bersamaan. Menurut Chanakya, negara yang tidak aman dapat ditaklukkan dengan mudah, dan dengan demikian akan berada di bawah kekuasaan penguasa asing dan menghadapi eksploitasi. Chanakya percaya bahwa keamanan nasional sangat penting untuk kemakmuran dan memiliki pasukan yang baik merupakan faktor penting dalam penyediaan keamanan nasional. Dia juga memahami bahwa kemakmuran sangat penting untuk keamanan nasional. Karena negara miskin tidak dapat memiliki sumber daya untuk mempertahankan keamanannya. Dengan demikian, ia percaya bahwa kemakmuran dan keamanan nasional saling bergantung.²⁵

Berbicara tentang kekuasaan suatu negara, atau "kekuatan nasional" dengan kata lain, Chanakya melalui Arthashastra mengidentifikasi tiga *shaktis*: *utsahashakti*, *prabhavashakti* dan *mantrashakti*. *Utsahashakti* berarti kekuatan untuk memberikan dorongan, energi, dan arah kepada negara dan unsur-unsurnya, dan terutama berhubungan dengan penguasa atau raja. Di zaman modern, bisa disamakan dengan kepemimpinan suatu negara. *Prabhavashakti* berarti kekuatan untuk menghasilkan 'efek' yang menguntungkan negara, dan berkaitan dengan ekonomi dan kekuatan militer suatu negara. Akhirnya, *mantrashakti* berarti kekuatan untuk mempengaruhi, menarik, mendorong dan mengurung. Dalam pengertian kontemporer, hal ini berkaitan dengan nasihat dan diplomasi yang baik.²⁶

²⁴ Kautilya Arthashastra 8:1.63

²⁵ Malay Mishra, "Kautilya's Arthashastra: Restoring its Rightful Place in the Field of International Relations", *Journal of Defence Studies*, Volume 10, Nomor 2, April-June 2016, hlm. 77-109

²⁶ Rangarajan.*op. cit.* hlm. 559

2.1.3 Konsep Diplomasi Pertahanan

Dalam kajian pertahanan negara, dikenal sebutan Diplomasi Pertahanan yang tujuannya adalah melakukan upaya diplomatik baik ke dalam atau pun keluar, yang menggunakan perspektif pertahanan negara. Upaya diplomatik ini bisa saja kerja sama antar negara atau pun intra negara yang melibatkan peran militer atau pun nirmiliter.

Secara umum terdapat beberapa definisi dari diplomasi pertahanan. Rajeswari Pillai Rajagopalan (2008) mendefinisikan diplomasi pertahanan sebagai *“categorized under such heads as defence exchanges to include joint training with the militaries of foreign countries”*.²⁷ Rajagopalan memandang diplomasi pertahanan sebagai tindakan yang mengikutsertakan pertukaran pertahanan (militer) sebuah negara serta latihan bersama dengan negara asing. Pengertian ini merujuk kepada pengertian harfiah diplomasi pertahanan yang bersifat militeristik. Sedangkan Matsuda Yasuhiro (2006) memberikan pengertian diplomasi pertahanan sebagai, *“all diplomatic activities relating to national security and military diplomatic activities”*.²⁸ Sehingga dapat dikatakan bahwa pengertian dari Matsuda ini lebih luas di mana diplomasi pertahanan tidak hanya soal pertukaran militer tapi lebih kepada segala bentuk aktivitas yang ditujukan untuk mewujudkan keamanan nasional serta aktivitas diplomatik militer. Dilain pihak, Mayor Laut (P) Salim (2012) memberikan pengertian diplomasi pertahanan sebagai tindakan *“untuk saling memperkuat Confidence Building Measure (CBM) dan sekaligus memperkuat stabilitas kawasan”*.²⁹ Sehingga dari ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa diplomasi pertahanan merupakan seluruh kegiatan diplomatik yang

²⁷ Pillai Rajeswari Rajagopalan., *Military Diplomacy: The Need for India to Effectively Use In Its Conduct of Diplomacy*, 2008, dalam https://www.academia.edu/17696780/Military_Diplomacy_The_Need_for_India_to_Effectively_Use_In_Its_Conduct_of_Diplomacy, diakses pada 18 Juni 2018

²⁸ Matsuda Yasuhiro, *“An Essay on China’s Military Diplomatic: Examination of Intentions in Foreign Strategy”*, (Japan: NIDS Security Report No.7 December 2006.) Hlm. 1-40

²⁹ Salim. *Peningkatan Kerjasama Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara Guna Mendukung Diplomasi Pertahanan dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Kawasan*. (Jakarta: Pusat Pengkajian Maritim Seskoal, 2012)

berkaitan dengan keamanan nasional dan kegiatan militer dengan negara-negara lain yang bertujuan untuk memperkuat CBM sebuah negara terhadap negara lainnya serta untuk memperkuat stabilitas kawasan.³⁰

Banyak cendekiawan yang telah membuat daftar kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh sebuah negara dalam upayanya menjalankan diplomasi pertahanan negara tersebut. Hal tersebut dijabarkan oleh Andrew Cottey dan Anthony Foster (2004) dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Defence Diplomacy Activities	
✚	Bilateral and multilateral contacts between civilian defence officials and senior military officers
✚	Appointment of defence attachés to foreign countries
✚	Bilateral defence cooperation agreements
✚	Training of foreign civilian and military personnel
✚	Provision of advice and expertise on democratic civilian control over the armed forces, defence management and military technical areas
✚	Contacts and exchanges between military personnel and units, port calls
✚	Placement of liaisons officers in defence and military establishment of partner countries
✚	Deployment of training teams
✚	Provision of military equipment and other material assistance
✚	Bilateral or multilateral military exercise or training

Source: Andrew Cottey and Anthony Foster, *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*, Adelphi Paper No. 365 (London: IISS, 2004), p. 7.

Diplomasi pertahanan memiliki beberapa tujuan di dalam implementasinya. Adapun tujuan dari diplomasi pertahanan seperti pertemuan pasukan di berbagai kegiatan yang dilakukan Kementerian Pertahanan setiap negara untuk menghilangkan permusuhan, membangun dan menjaga kepercayaan, dan membantu dalam angkatan bersenjata yang bertanggung jawab secara demokratis, serta berkontribusi terhadap pencegahan dan penyelesaian konflik.³¹ Secara operasional, kegiatan di

³⁰ Budi Hartono, Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Arms Trade Treaty (ATT) di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tesis Magister. (Bogor: Prodi Diplomasi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia, 2016).

³¹ Wolfgang Koerner, "Security Sector Reform: Defence Diplomacy", *Parliamentary Information and Research Service: Library of Parliament*, 2006, dalam

atas meliputi langkah-langkah membangun kepercayaan dan keamanan, bantuan terhadap negara-negara (materil maupun non-materil), dan pengontrolan senjata (*arms control*).³²

Sementara itu bagi Chanakya atau Kautilya yang memiliki pemikiran realis, diplomasi merupakan senjata lain yang digunakan dalam peperangan berkepanjangan yang selalu terjadi ataupun direncanakan akan terjadi (*Diplomacy was just another weapon used in the prolonged warfare that was always either occurring or being planned for*). Hal ini disebabkan karena Chanakya berasumsi bahwa negara itu hidup pada dunia hubungan internasional di mana hanya ada dua pilihan, antara menaklukkan atau ditaklukkan. Sehingga ia tidak lagi mengatakan “bersiaplah berperang namun tetap mengharapkan perdamaian.” Justru Chanakya menyatakan sebaliknya, “bersiaplah untuk berperang dan berencanalah untuk menaklukkan”. Ketika Carl Von Clausewitz menyatakan bahwa perang hanyalah perpanjangan dari politik domestic, Chanakya justru berpendapat bahwa diplomasi merupakan tindakan perang yang halus, serangkaian tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh dan mendapatkan keuntungan bagi negara itu sendiri, segalanya dilakukan dengan mata menuju upaya penaklukkan.

*In this way, the conqueror should establish in the rear and in front, a circle (of kings) in his own interest. ... And in the entire circle, he should ever station envoys and secret agents, becoming a friend of the rivals, maintaining secrecy when striking again and again. The affairs of one, who cannot maintain secrecy, ... undoubtedly perish, like a broken boat in the ocean.*³³

Bagi Chanakya kebijakan luar negeri hanyalah perpanjangan perang sebuah negara. Karena tujuan kebijakan luar negeri bukanlah untuk menghentikan perang, namun lebih kepada upaya guna menangkis

[https://lop.parl.ca/Content/LOP/Research Publications/prb0612-e.pdf](https://lop.parl.ca/Content/LOP/Research%20Publications/prb0612-e.pdf) diakses pada 18 Juni 2018

³² United Kingdom, “Defence Diplomacy”, *Ministry of Defence Policy Paper No. 1*, 2014. Hlm 2-3.

³³ Kangle, *op.cit.* hlm. 366.

kekalahan dan memastikan keberhasilan negara tersebut dalam peperangan berikutnya. Bagi Chanakya, prinsip kebijakan luar negeri ini - bahwa negara-negara bertindak dalam kepentingan politik, ekonomi, dan militer mereka - merupakan kebenaran abadi dari ilmu politiknya, atau Arthashastra. Dia tidak percaya bahwa negara-negara tidak pernah bertindak dengan cara yang altruistik - memang, Chanakya menganjurkan tindakan kemanusiaan yang juga bertepatan dengan kepentingan pribadi - tetapi ia percaya bahwa seseorang harus berasumsi, jika dipercayakan dengan kekuatan politik atau militer, bahwa tetangganya pada akhirnya akan bertindak untuk mencapai kepentingan mereka sendiri.

Terkait dengan Diplomasi dan Kebijakan luar negeri, Chanakya mencetuskan teori *Ṣāḍgunya* atau yang lebih dikenal dengan Six-fold Foreign Policy atau enam metode kebijakan politik luar negeri. Enam kebijakan politik luar negeri Chanakya merupakan penentuan (kebijakan) mundur, stabil/ berdiam diri dan maju. Keenam kebijakan politik tersebut adalah membuat perdamaian (*sandhi*), melakukan peperangan (*vigraha*), tinggal diam/netral (*asana*), mempersiapkan diri untuk perang/siaga (*yana*), mencari dukungan/aliansi (*samsraya*), dan kebijakan ganda yaitu membuat perdamaian dengan negara satu sementara itu juga mengadakan peperangan dengan negara lainnya.³⁴ Kondisi yang sedang berlangsung akan menentukan kebijakan apa yang sebaiknya akan digunakan.

Untuk mengadakan perdamaian, kita harus terlibat dulu dalam suatu kesepakatan atau perjanjian dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu. Perjanjian tanpa syarat umumnya digunakan untuk memperoleh informasi tentang musuh, sehingga raja bisa melakukan serangan setelah mempelajari titik lemah 'lawan-lawannya'. Perjanjian dengan kewajiban tertentu memungkinkan seorang "*raja bijaksana membuat raja negara tetangga memerangi negara tetangga lainnya untuk mencegah kemungkinan mereka bersatu dan kemudian menyerang negaranya*". Hal

³⁴ Kautilya Arthashastra 7.13. 42-44: 366

ini menunjukkan kondisi negara melakukan upaya antisipatif tertentu agar negara mereka tetap aman dan terhindar dari ancaman serangan negara tetangga.

2.1.4 Teori Hermeneutik Hans-Georg Gadamer

Hermeneutika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “*hermeneuein*” yang merujuk kepada arti “menafsirkan”. Dalam tradisi Yunani Kuno, kata *hermeneuein* digunakan dalam tiga makna yakni: mengatakan (*to say*), menjelaskan (*to explain*), dan menerjemahkan (*to translate*).³⁵ Hermeneutika dipahami sebagai seni dan ilmu menafsirkan khususnya tulisan-tulisan berkewenangan, terutama berkenaan dengan kitab suci dan atau identik dengan tafsir. Selain itu Hermeneutika juga dipahami sebagai suatu filsafat yang memusatkan bidang kajiannya pada persoalan “*understanding of understanding*” atau pemahaman pada pemahaman terhadap sebuah teks, utamanya teks Kitab suci yang datang dari kurun waktu, tempat dan situasi sosial yang asing bagi para pembacanya.³⁶

Pada dasarnya hermeneutik berhubungan dengan bahasa. Kita berpikir melalui Bahasa; berbicara dan menulis dengan Bahasa; kita mengerti dan menginterpretasi dengan Bahasa. Gadamer menyatakan bahwa Bahasa tidak boleh kita pikirkan sebagai yang mengalami perubahan. Bahasa harus kita pikirkan atau kita pahami sebagai sesuatu yang memiliki ketertujuan (teleologi) di dalam dirinya. Dalam artian kata-kata atau ungkapan secara aksidental tidak pernah memiliki kebakuan. Baik kata-kata ataupun ungkapan memiliki tujuan (*telos*) tertentu dan penuh dengan maksud. Sebagaimana dikatakan oleh Wilhelm Dilthey, bahwa setiap kata tidak pernah tidak bermakna.³⁷

³⁵ Richard E. Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer*. (Evanston: Northwestern University Press, 1996) hlm.. 23

³⁶ Edi Susanto, 2016. *Hermeneutika: Studi Hermeneutika: Kajian Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2016) hlm.2

³⁷ E. Sumaryono, *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*. (Yogyakarta: Kanisius, 2018) hlm. 26-7

Gadamer (1977) menyatakan bahwa hermeneutik adalah sebuah seni, dan bukanlah sebuah proses mekanis. Lebih lanjut, jika pemahaman merupakan jiwa dari hermeneutik, maka pemahaman tidak dapat dijadikan pelengkap proses mekanis. Karena hermeneutik merupakan sebuah seni, maka hermeneutik semacam ini tidaklah dapat dipersiapkan lebih dulu sebelum dibuat, tidak dapat diramalkan atau dikatakan sebelumnya.³⁸ Hermeneutika merupakan ontologi dari fenomenologi pemahaman. Sementara kunci dari pemahaman adalah partisipasi dan keterbukaan, bukan manipulasi apalagi pengendalian. Sedangkan pemahaman kita senantiasa merupakan suatu hal yang bersifat historis, peristiwa dialektis dan peristiwa kebahasaan. Inilah sebabnya kemudian hermeneutika kemudian selalu berhubungan dengan pengalaman, bukan hanya pengetahuan, dialektika dan bukan metodologi. Karena metodologi hampir selalu memprastrukturkan kegiatan ilmiah seorang peneliti. Sementara hermeneutika dialektis membimbing manusia untuk menyingkap hakikat kebenaran, serta menemukan hakikat realitas segala sesuatu secara sebenarnya.³⁹

Pokok-pokok pemikiran Hermeneutika Gadamer tergambar ke dalam empat teori, yakni Teori Kesadaran Keterpengaruh oleh Sejarah (*Historically Effected Consciousness*); Teori Pra-Pemahaman (*Preunderstanding*); Teori Penggabungan/Asimilasi Horison (*Fussion Of Horisons*) Dan Teori Lingkaran Hermeneutik (*Hermeneutical Circle*); Dan Teori Penerapan (*Application*).⁴⁰

a. Teori Kesadaran Keterpengaruh oleh Sejarah (*Historically Effected Consciousness*)

Berdasarkan teori ini, pemahaman seorang penafsir dipengaruhi oleh situasi hermeneutik tertentu yang melingkupinya, baik itu

³⁸ Hans-G Gadamer, *Philosophical Hermeneutics*, trans. Dan ed. David E. Linge. (Berkeley: The University of California Press. 1977)

³⁹ Kaelan. 2017. *Filsafat Bahasa Semiotika dan Hermeneutika*. (Yogyakarta: Paradigma), hlm.285

⁴⁰ Susanto, Edi. *Op. cit.*. hlm. 52-55

berupa tradisi, kultur, maupun pengalaman hidup. Maka dari itu, ketika sedang menafsirkan teks, seorang penafsir seyogyanya menyadari bahwa dia berada pada posisi tertentu yang bisa sangat mewarnai pemahamannya terhadap suatu teks yang sedang ditafsirkan. Maka dari itu penafsir harus mampu mengatasi subyektivitasnya ketika dia menafsirkan suatu teks.

b. Teori Pra-Pemahaman (*Preunderstanding*)

Pra pemahaman merupakan posisi awal seorang penafsir, yang memang pasti ada bahkan harus ada ketika ia membaca teks. Prapemahaman ini disebut sebagai *vorverständnis* dan ditujukan agar seorang penafsir mampu mendialogkannya dengan isi teks yang ditafsirkan. Tanpa pra-pemahaman seseorang tidak akan berhasil memahami teks dengan baik. Namun menekankan bahwa pra-pemahaman ini tidak boleh kaku. Ia harus terbuka dan siap untuk dikritisi, direhabilitasi dan dikoreksi oleh penafsir itu sendiri ketika ia sadar atau mengetahui bahwa pemahamannya itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh teks yang ditafsirkan. Sehingga kesalahpahaman terhadap pesan teks dapat dihindari, hasil dari rehabilitasi atau koreksi terhadap prapemahaman ini disebut dengan istilah *vollkommenheit des vorverständniss* (kesempurnaan pra-pemahaman).

c. Teori Penggabungan/Asimilasi Horison (*Fussion Of Horisons*) Dan Teori Lingkaran Hermeneutik (*Hermeneutical Circle*)

Dalam proses penafsiran seseorang harus ada bahwa ada dua horizon, yakni (1) cakrawala pengetahuan atau horizon dalam teks dan (2) cakrawala pemahaman atau horizon pembaca. Kedua horizon ini pasti muncul dalam proses penafsiran. Yang perlu digarisbawahi adalah dalam proses penafsiran ini seorang pembaca teks akan memulainya dengan cakrawala hermeneutiknya (pra-pemahamannya), namun ia juga harus memperhatikan bahwa teks juga memiliki horizonnya sendiri yang

sangat mungkin berbeda dari horizon sang pembaca. Contoh mudahnya adalah ketika seseorang membaca teks yang berasal dari masa lalu, maka dia harus memperhatikan horizon historis di mana teks tersebut muncul, disusun, ditulis ataupun diungkapkan. Dengan demikian memahami teks berarti membiarkan teks tersebut berbicara. Interaksi antar horizon inilah yang disebut Gadamer sebagai “lingkaran hermeneutik”. Di mana horizon pembaca hanya berfungsi sebagai titik awal pijakan dalam memahami teks. Titik pijak ini merupakan suatu “pendapat” atau “kemungkinan” bahwa teks ini berbicara tentang suatu hal. Titik pijak ini harus bisa membantu memahami apa yang sebenarnya dimaksud oleh teks. Bukan malah mengungkung teks dan memaksanya untuk berbicara sesuai dengan titik pijak pembaca. Dengan kata lain objektivitas teks lebih diutamakan daripada subjektivitas pembaca

d. Teori Penerapan (*Application*)

Menurut Gadamer, seorang pembaca, disamping harus memahami dan menafsirkan teks, juga harus mampu melakukan “penerapan” (*anwendung*) dari pesan-pesan atau ajaran-ajaran ketika teks kitab suci tersebut ditafsirkan. Menurut Gadamer pesan yang harus diaplikasikan pada masa penafsir bukanlah makna literal (harfiah) dari teks, namun lebih kepada *meaningful sense* (makna yang berarti) atau pesan yang lebih mendalam daripada sekadar makna literal teks tersebut.

Hermeneutik menurut Gadamer lebih merujuk pada usaha memahami dan menginterpretasi sebuah teks. Sehingga hermeneutik merupakan bagian dari keseluruhan pengalaman mengenai dunia. Hermeneutik sendiri berhubungan dengan suatu teknik tertentu (*techne/kunstlehre*) dan berusaha kembali ke susunan tata bahasa, aspek kata-kata retorik dan aspek dialektis sebuah Bahasa. Karena *techne* inilah maka hermeneutik juga dipandang sebagai sebuah filsafat praktis yang juga

berarti sebuah ilmu pengetahuan tentang segala hal yang universal yang mungkin untuk diajarkan.⁴¹

2.1.5 Paradigma Realisme

Realisme merupakan salah satu paradigma yang dominan dalam ilmu Hubungan Internasional. Realisme memandang bahwa negara selayaknya manusia, memiliki sifat alamiah untuk mendominasi negara-negara lainnya. Negara dalam pandangan Hans. J Morgenthau adalah entitas yang selalu berupaya mencari *power* (kekuasaan, pengaruh, kekuatan). Negara mementingkan juga selayaknya *nature* manusia mementingkan diri sendiri dan pada tataran tertentu mengambil tindakan ekstrim untuk kepentingannya sendiri.⁴²

Terdapat beberapa asumsi dasar dalam paradigma realisme ini. pertama realisme meletakkan dasar asumsinya pada pesimisme dan skeptisme terhadap *nature* dari negara sebagaimana *nature* manusia. Asumsi kedua adalah karena *nature* yang pesimistik dan skeptik ini, kemajuan politik internasional dan politik domestik itu peluangnya sangat kecil. Asumsi ketiga adalah dunia sebenarnya terdiri atas negara-negara berdaulat yang saling terlibat konflik anarkis satu sama lain, sehingga perang sering kali menjadi upaya akhir dalam penyelesaian konflik. Asumsi keempat adalah negara selalu berupaya menjunjung tinggi keamanan nasional serta kelangsungan hidup negaranya.⁴³

Terdapat beberapa premis utama dalam realisme. Pertama, negara selayaknya manusia, juga mementingkan diri sendiri, berusaha mencapai posisi terkuat untuk dapat mengendalikan negara-negara lainnya. Upaya mencari *power* (kekuatan, kekuasaan, pengaruh) yang dilakukan oleh negara adalah perjuangan tiada henti untuk mendapatkan dominasi serta legitimasi atas keamanan. Kedua, hubungan internasional dan politik dunia

⁴¹ Sumaryono *op.cit.* hlm. 83-4

⁴² M Saeri, "Teori Hubungan Internasional: Sebuah Pendekatan Paradigmatik" dalam *Jurnal Transnasional Volume 3*, Nomor 2. Februari 2012, hlm. 5

⁴³ Robert Jackson dan George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 88.

bersifat anarki. Negara adalah aktor utama dan tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari negara. Ketiga, penyelesaian konflik maupun kompetisi internasional antar aktor negara sering kali diselesaikan melalui peperangan. Dengan demikian penguatan militer merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh negara. Setiap negara harus bisa mempertahankan negaranya sendiri (*self-help*).

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah penelitian. Penelitian terdahulu yang relevan ini dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian. Penelitian terdahulu yang relevan Hal ini dapat dijadikan rujukan dan juga perbandingan penelitian. Adapun dalam penelitian ini, peneliti merujuk empat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dijalankan oleh peneliti sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Judul Penelitian	<i>The Arthashastra: Assessing the Contemporary Relevance of an Ancient Indian Treatise on Statescraft</i>	The Ultimate Pragmatist: Kautilya's Philosophy on SMART Power in National Security	Diplomatic Theory of Kautilya and Sun Tzu: Assessing Interpretations	Model Diplomasi Pertahanan Indonesia
Penulis	Major Abhishek Kumar	Breena Coates and Col. Jeffrey Caton	Anusmita Dutta dan Manish S Dabhade	Agung Nurjana

Tahun Terbit	2016	2010	2017	2016
Penerbit	<i>Faculty of U.S Army Command and General Staff College (Thesis)</i>	International Society for Military Ethics (ISME) program, University of San Diego	SAGE Publication	Universitas Pertahanan
Teori	National Power and Security Dilemma, Theory of Power in International System, Kautilyan Foreign Policy.	Soft Power and Smart Power, Kautilya's Raj Mandala Model of Diplomacy, Hard Power,	Theory Diplomacy, and Hermeneutik	Teori Diplomasi Pertahanan
Hasil Penelitian	Prioritas Chanakya terhadap unsur-unsur kekuatan nasional negara dan fokusnya pada peningkatan kekuatan negara,	Ide Kautilya mendukung <i>smart power</i> yang dikombinasikan dengan diplomasi dan oportunisme, ide Kautilya tentang raja	Menelusuri mengenai aspek teori diplomatik dalam Hubungan internasional beserta pergeserannya. Menjelaskan	Menjelaskan mengenai model diplomasi Indonesia. Praktik Diplomasi Pertahanan Indonesia dilaksanakan dalam

	menemukan kesamaan dalam pilihan kebijakan Cina kontemporer. Tulisan ini juga menjabarkan mengenai analisa lingkungan geopolitik kontemporer tiongkok dalam doktrin kautilya.	mandala merupakan sebuah model di mana raja/pemimpin negara bisa memutuskan antara bekerjasama, melakukan kolusi, aliansi, akuisisi atau perusakan dalam berhubungan dengan negara lain. Tulisan ini menjelaskan arthashastra dengan <i>soft power</i> , dan juga <i>hard power</i> .	mengenai pemahaman non barat mengenai teori diplomatik, menjabarkan pendekatan sudut pandang Chanakyadan juga Sun Tzu melalui analisis hermeneutik	kerangka Bilateral dan multilateral baik dalam cakupan regional ataupun global. Mencakup tiga lembaga yang saling berkait satu sama lain yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan juga Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Sigifikansi terhadap penelitian tesis	Tulisan ini dijadikan rujukan bagi peneliti untuk	Tulisan ini dijadikan rujukan bagi peneliti	Tulisan ini membantu peneliti untuk melihat teori	Tulisan ini menjadi bahan rujukan

	mendalami bagaimana nilai serta konsep-konsep dalam Arthashastra dan relevansinya terhadap upaya menakar ancaman dalam analisa lingkungan geopolitik kontemporer.	untuk mendalami penggunaan <i>hard power</i> , <i>soft power</i> dan <i>smart power</i> dalam Arthashastra	diplomatik dari Chanakya yang dilihat dari perspektik hermeneutik. Dan memberikan sebuah pemahaman yang lebih komprehensif karena penelitian ini juga memberikan pandangan baik dari pemikiran Chanakya maupun pemikiran sun Tzu.	peneliti untuk mengetahui model diplomasi pertahanan indonesia agar kemudian dapat di telaah menggunakan nilai dan konsep yang ada dari Arthashastra.
Perbedaan dengan penelitian	Belum membahas mengenai Diplomasi Pertahanan dalam Pandangan	Belum membahas mengenai Diplomasi Pertahanan dalam Pandangan	Belum membahas mengenai Diplomasi Pertahanan dalam Pandangan	Belum membahas mengenai Diplomasi Pertahanan dalam Pandangan

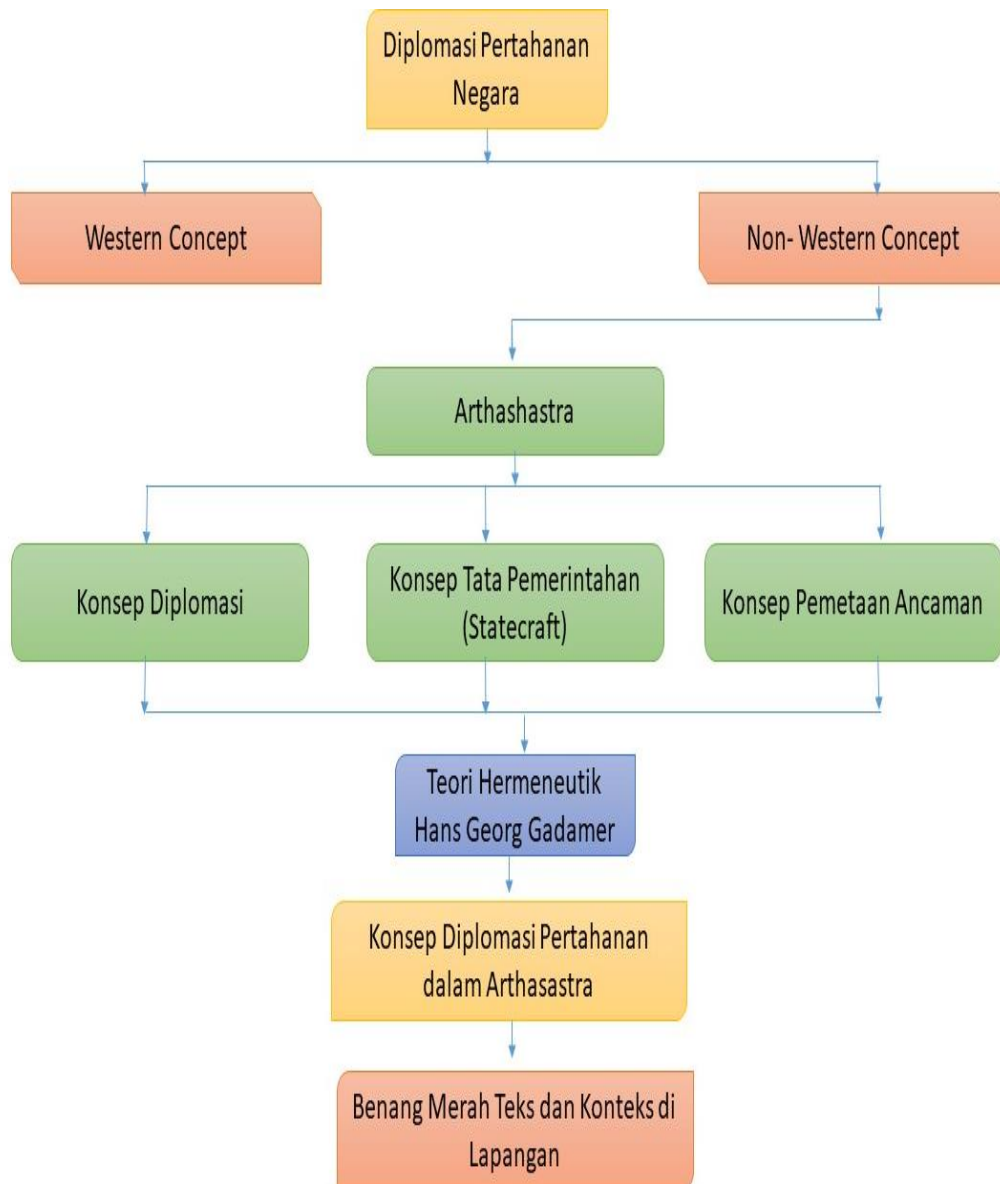
	Chanakya/ Kautilya Arthashastra	Chanakya/ Kautilya Arthashastra	Chanakya/ Kautilya Arthashastra	Chanakya/ Kautilya Arthashastra
--	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Sumber: Hasil Olah Peneliti dari Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, 2018

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah diagram yang menjelaskan mengenai garis besar alur logika yang digunakan oleh peneliti dalam sebuah penelitian.⁴⁴ Adapun kerangka penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Diplomasi pertahanan merupakan disiplin ilmu baru. Sebagian besar teori-teori serta konsep yang dikembangkan dalam kajian diplomasi pertahanan lebih dominan kepada konsep dan teori-teori *western oriented*. Padahal konsep non western yang membahas mengenai konsep diplomasi dan pertahanan negara juga ada. Salah satunya adalah Arthashastra. Dalam Arthashastra terdapat tiga teori besar yang membahas mengenai diplomasi, tata pemerintahan serta konsep pemetaan ancaman, yang jika dianalisis menggunakan teori Hermeneutik Hans G Gadamer dapat menghasilkan sebuah konsep diplomasi pertahanan dalam Arthashastra yang dapat dijadikan rujukan lain dalam paradigma diplomasi pertahanan. Setelah diperoleh konsep diplomasi pertahanan dalam Arthashastra ini, kemudian peneliti berupaya untuk mencari benang merah antara teks dan konteks dari praktek diplomasi pertahanan Indonesia yang terjadi di Lapangan. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 mengenai Kerangka Pemikiran.

⁴⁴ Husaini Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008).



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2018